DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena Dalam RKUHP serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum*, (Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang), 2011.

Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.

Apeldorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Asnawi, M. Natsir, Hemeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008.

Aprilianda, Nurini, dkk, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teroi dan Praktik, Malang: Unversitas Brawijawa Press, 2017.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Afthonul Afif, *Pemaafan: Rekonsiliasi dan Restoratif Justice*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.

Baringbang, R.E., Catur Wangsa yang Bebas Kolusi: Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001.

Christanto, Yogi Natanel, Quasi Abolisionisme dan Transformasi Hukum: Implikasi Implementasi UU No. 1 Tahun 2021, Indramayu: Adab, 2024

Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia.

David Tait, Pardons in Perspective: The rRole of Fporgiveness in Criminal Justice, Federal Sentecing Reporter, 2001.

Duswara Machmudin, Dudu, Pengantar Ilmu Hukum: SebuahSketsa, Bndung: Refika Aditama, 2010.

Eddy Omar Sharif Hiariej, Hukum Acara Pidana, Tangeran Selatan: Universitas Terbuka, 2017.

Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan: CV. M. Manhaji, 2020.

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni

Hamdan, M, Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHAP), 2010.

Iqrak Sulhin, *Filsafat Pemasyarakatan dan Paradoks Pemenjaraan di Inodnesia*, Dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 2015.

J.Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material, Yogyakarta: Maharsa, 2019.

Kadri Husin dan Budi Riski Husin, Sitem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Diah Sulistiyanti, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung: PT Alumni, 2013.

Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mardjono Reksodipuro, Menyelaraskan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.

Moh Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Mahmutaram, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022.

Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Riduan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Alumni, 1991.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata.

Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980.

Sri Susantiek, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003.

JURNAL

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrahman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal, 2023, Vol. 6, No. 2.

Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,* Jurnal, Yuridika, 2017, Vol. 32, No.1.

Hana Krisnamurti, Harmonisasi Asas Pemaafan Hakim (Jusicial Pardon) dalam Hukum Positif di Indonesia untuk mencapai Keadilan yang Bermartabat, Jurnal Litigasi, 2025, No. 26.

Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam, dikutip dari Ahmad Bahiej, *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat*, Asy-Syirah, 2005, Vol. 39, No. I.

Marrismawati, dkk, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif, Jurnal Litigasi Amsir, 2024, Vol. 11, No. 3.

Octaviana, Bunga Kharisma, dan Fran Simangungsong, Urgensi Penambahan Putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pasal 191 KUHAP, Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2024, Vol. 5, No. 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Resolusi No. 10 Tahun 1976 Tentang *Alternative Penal Measure to Imprisonment* Pasal 3 huruf a.

Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 9a.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim.

SKRIPSI DAN TESIS

Arif Setiawan, Konsep Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP, Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Badruzzaman, Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Beserta Peluang dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Isam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

Minahatus Saniyah, *Analisis Komparatif tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam),* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf dalam Konteks Kebijakan Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

DATA ELEKTRONIK

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/keadaan

Hukumonline, *KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus ke Pemulihan Sosial*, https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/?page=all

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/timbang

Mahkamah Agung Republik Indonesia, MA Gelar Uji Publik Raperma Pemaafan Hakim, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/7129/ma-gelar-uji-publik-raperma-pemaafan-hakim

Tempo, "*Riwayat Putusan Pemaafan Hakim di Indonesia*", https://www.tempo.co/hukum/riwayat-putusan-pemaafan-hakim-di-indonesia 2276683#google_vignette